



SEJARAH BALAI PPMHKP BANJARBARU

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Banjarbaru memiliki sejarah panjang dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Selatan. Perjalanan kelembagaan Balai PPMHKP Banjarbaru tidak terlepas dari dinamika organisasi karantina ikan serta pengendalian mutu hasil perikanan di Indonesia. Berbagai transformasi yang terjadi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan guna mendukung perlindungan konsumen, peningkatan daya saing produk, dan penguatan akses pasar nasional maupun internasional.

Sebelum Tahun 2002

Awalnya, pelayanan karantina ikan di Kalimantan Selatan dilakukan melalui Wilayah Kerja (Wilker) Bandara Sepinggán, yang berada di bawah naungan Balai Karantina Ikan Sepinggán Balikpapan. Pada masa ini, pelayanan masih bersifat terbatas, khususnya di bandara, untuk mendukung lalu lintas ikan dan hasil perikanan.

Tahun 2002 – 2005

Dengan meningkatnya lalu lintas perikanan di Kalimantan Selatan, dibentuk Pos Karantina Ikan Syamsudin Noor di Banjarmasin. Pos ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Stasiun Karantina Ikan Kelas I Syamsudin Noor Banjarmasin. Perubahan ini menandai langkah awal kehadiran kelembagaan yang lebih permanen dalam menjalankan fungsi karantina ikan di daerah.



SEJARAH BALAI PPMHKP BANJARBARU

Tahun 2011

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011, kelembagaan ini kembali ditingkatkan menjadi Balai Karantina Ikan Kelas II Syamsudin Noor Banjarmasin, yang selanjutnya dikenal sebagai Balai KIPM Kelas II Banjarmasin. Dengan status ini, fungsi pengawasan tidak hanya terbatas pada karantina, tetapi juga mulai diperluas ke bidang mutu hasil perikanan.

Tahun 2017 – 2023

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN KP.54/PERMEN-KP/2017, kelembagaan resmi menjadi Balai KIPM Banjarmasin. Tugas dan fungsi lembaga ini mencakup dua aspek utama, yaitu karantina ikan serta pengawasan mutu hasil perikanan, yang dijalankan dalam rangka melindungi sumber daya ikan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi dan perdagangan.

Tahun 2023 – 2025

Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Banjarmasin bergabung ke dalam struktur Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Transformasi ini menjadikan fokus kelembagaan lebih terarah pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, guna memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi standar keamanan pangan, standar ekspor, serta mampu bersaing di pasar internasional.



SEJARAH BALAI PPMHKP BANJARBARU

Tahun 2025–Sekarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, nomenklatur Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Banjarmasin resmi berubah menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Balai PPMHKP) Banjarbaru.

Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan Badan Mutu KKP dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Dengan perubahan tersebut, Balai PPMHKP Banjarbaru melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengawasan mutu, sertifikasi, inspeksi, surveilans, pengujian laboratorium, serta pembinaan kepada pelaku usaha perikanan guna menjamin mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan.

Transformasi ini menandai babak baru perjalanan kelembagaan yang semakin berfokus pada penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk mendukung daya saing produk perikanan Indonesia di pasar nasional maupun internasional.